

Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Konflik Agraria dan Ancaman Satwa Liar pada Masyarakat Desa Penyangga Hutan Kecamatan Suoh

Asri Mutrikah^{1)*}, Rosydalena Putri²⁾, Alief Rakhman Setyanto³⁾
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: asray3009@gmail.com^{1)*}, rosydalena.putri@radenintan.ac.id²⁾,
aliefrahmansetyanto@radenintan.ac.id³⁾

Abstrak

Konflik agraria dan interaksi manusia dengan satwa liar di wilayah desa penyangga hutan menjadi isu krusial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, namun umumnya dikaji secara terpisah dan belum terintegrasi dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan konflik hak kepemilikan tanah dan ancaman satwa liar serta implikasinya terhadap ketahanan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara tematik melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa ketidakpastian status lahan akibat disharmoni pengakuan adat dan hukum formal membatasi akses ekonomi masyarakat, sementara gangguan satwa liar menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konflik agraria dan manusia-satwa liar dalam kerangka fenomenologis berbasis nilai ekonomi Islam. Temuan menunjukkan adanya strategi adaptif berbasis solidaritas, pengelolaan kolektif, dan musyawarah lokal untuk memperkuat ketahanan sosial ekonomi.

Kata Kunci: Ancaman Satwa Liar; Fenomenologi; Ketahanan Sosial Ekonomi; Konflik Kepemilikan Tanah; Nilai Ekonomi Islam.

Abstract

Agrarian conflicts and human-wildlife interactions in forest buffer villages have become critical issues affecting community welfare, yet they are often examined separately and rarely integrated within an Islamic economics perspective. This study aims to analyze the relationship between land ownership conflicts and wildlife threats and their implications for the socio-economic resilience of communities in Suoh District, West Lampung Regency. This research employs a qualitative approach with a phenomenological design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed thematically through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that uncertainty in land ownership status due to the disharmony between customary and formal legal recognition limits community access to economic resources, while wildlife disturbances reduce agricultural productivity and increase social risks. The novelty of this study lies in integrating agrarian conflict and human-wildlife conflict within a phenomenological framework based on Islamic economic values. The findings also reveal adaptive strategies developed by communities through social solidarity, collective resource management, and local deliberation to strengthen socio-economic resilience.

Keywords: *Economic Resilience; Islamic Economic Values; Land Ownership Conflict; Phenomenology; Wildlife Threats.*

Pendahuluan

Wilayah desa penyangga hutan memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, desa-desa seperti Ringin Jaya, Sukamarga, dan Tugu Ratu berbatasan langsung dengan kawasan hutan, sehingga kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian serta pemanfaatan sumber daya alam. Ketergantungan tersebut menempatkan masyarakat pada kondisi rentan terhadap dinamika pengelolaan sumber daya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan tenurial dan interaksi dengan satwa liar. Situasi ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi struktur sosial ekonomi masyarakat setempat. Permasalahan agraria di Indonesia masih menunjukkan pola yang berulang akibat ketidakseimbangan penguasaan lahan, kompleksitas regulasi, serta terbatasnya pengakuan terhadap hak masyarakat lokal (Budianto & Apriani, 2026).

Ketidakjelasan status lahan sering menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan institusi negara, yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap sumber penghidupan. Di lokasi penelitian, perbedaan antara klaim adat dan status hukum kawasan hutan menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan lahan. Pada saat yang sama, perubahan tutupan lahan dan penyempitan habitat alami meningkatkan intensitas interaksi antara manusia dan satwa liar, seperti gajah dan harimau, yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat (Nisa et al., n.d.). Dari sisi ekologis, konflik dengan satwa liar menunjukkan intensitas yang signifikan. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir terjadi sejumlah kasus serangan harimau terhadap manusia, bahkan dalam satu periode terdapat beberapa korban jiwa akibat interaksi langsung saat masyarakat beraktivitas di kebun. Selain itu, konflik dengan gajah liar juga se ring terjadi dalam bentuk perusakan lahan pertanian, permukiman, hingga fasilitas umum. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu rasa cemas, mengganggu aktivitas produksi, serta menurunkan stabilitas sosial ekonomi masyarakat desa penyangga hutan.

Tabel 1. Korban Interaktif Negatif Manusia dan Satwa Liar

No.	Tanggal	Nama	Kondisi
1.	8 febuari 2024	Gunarso (umur 47)	Meninggal dunia
2.	22 febuari 2024	Sahri (umur 28)	Meninggal dunia
3.	11 Maret 2024	Samanan (umur 41)	Luka-luka/ selamat
4.	21 September 2024	Karim yulianto (umur 46)	Meninggal dunia
5.	22 Januari 2025	Zainudin	Meningal dunia
6.	26 Mei 2025	Sudarso (umur 50)	Meninggal dunia
7.	10 Juli 2025	Misni	Meninggal dunia
8.	7 Agustus 2025	Ujang (umur 37)	Meningal dunia
9.	5 september 2025	Amir (umur 50)	Luka-luka/ selamat

Sumber: Laporan Pemkab Lampung Barat Tahun 2024-2025

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena konflik agraria dan konflik manusia-satwa liar tidak terjadi secara terpisah, melainkan saling berkaitan. Ketidakjelasan status lahan mendorong ekspansi aktivitas masyarakat ke wilayah yang berdekatan dengan habitat satwa liar, sehingga meningkatkan potensi konflik.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa isu agraria dan konflik manusia-satwa liar umumnya masih dibahas secara terpisah. Penelitian mengenai konflik agraria lebih banyak menitikberatkan pada aspek struktur penguasaan lahan, ketimpangan akses sumber daya, serta peran negara dan aktor lainnya dalam konflik (Zuber, 2016; Nadilla et al., 2025). Konflik ini umumnya muncul akibat tumpang tindih klaim lahan dan lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat lokal sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan (Zuber, n.d.). Di sisi lain, studi mengenai konflik manusia-satwa liar lebih berfokus pada aspek ekologis, seperti kerusakan tanaman, ancaman terhadap keselamatan manusia, serta gangguan terhadap produktivitas pertanian. Konflik ini sering terjadi di wilayah perbatasan antara kawasan hutan dan lahan pertanian, di mana aktivitas manusia semakin mendekati habitat satwa liar (Hafizuddin et al., 2026).

Namun demikian, integrasi kedua isu tersebut dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung memisahkan konflik agraria sebagai persoalan sosial-ekonomi dan konflik satwa liar sebagai persoalan ekologis. Padahal, dalam konteks desa penyangga hutan, kedua konflik tersebut sering terjadi secara bersamaan dan saling berkaitan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis keterkaitan antara konflik hak kepemilikan tanah dan ancaman satwa liar serta implikasinya terhadap ketahanan sosial ekonomi masyarakat desa penyangga hutan di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam yang lebih kontekstual serta menawarkan perspektif alternatif dalam pengelolaan konflik berbasis nilai keadilan dan keberlanjutan.

Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan analisis untuk memahami nilai-nilai ekonomi Islam dalam konflik hak kepemilikan tanah dan ancaman satwa liar melalui pendekatan fenomenologi sosial ekonomi masyarakat desa penyangga hutan di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

Konflik Hak Kepemilikan Tanah

Konflik hak kepemilikan tanah dipahami sebagai kondisi ketidakseimbangan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengakuan atas lahan antara masyarakat, negara, dan pihak lain. Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan status hukum tanah, tumpang tindih regulasi, serta perbedaan antara klaim formal dan klaim sosial masyarakat lokal. Dalam konteks desa penyangga hutan, konflik ini tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi sosial atas tanah yang telah lama dikelola masyarakat secara turun-temurun. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menganalisis bentuk dan sumber konflik kepemilikan tanah yang dialami masyarakat (Islam et al., 2025).

Ancaman Satwa Liar (Human-Wildlife Conflict)

Ancaman satwa liar dipahami sebagai bentuk interaksi negatif antara manusia dan satwa liar akibat penyempitan habitat, perubahan tata guna lahan, dan tekanan aktivitas manusia terhadap kawasan hutan. Konflik ini ditandai dengan kerusakan lahan pertanian, gangguan terhadap aktivitas ekonomi, serta munculnya rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Dalam konteks desa penyangga hutan, konflik ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan ekosistem dan ekspansi aktivitas manusia ke wilayah habitat satwa liar (Woolaston et al., 2023). Konsep ini digunakan untuk menganalisis dampak gangguan satwa liar terhadap sosial ekonomi masyarakat.

Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat

Ketahanan sosial ekonomi merupakan kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan eksternal seperti konflik lahan dan gangguan lingkungan. Ketahanan ini ditentukan oleh modal sosial, akses terhadap sumber daya, serta kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan ekologis. Dalam penelitian ini, konsep ketahanan digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat desa penyangga hutan merespons dampak konflik agraria dan ancaman satwa liar terhadap keberlangsungan hidup mereka (Tjachja et al., 2024).

Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan amanah sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menghindari kerusakan (fasad), menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan ekosistem (Mashadi, n.d.). Selain itu, larangan eksploitasi berlebihan juga ditegaskan dalam ajaran Islam yang melarang tindakan merusak bumi setelah diciptakan dalam keadaan baik (QS. Al-A'raf: 56).

Dalam konteks konflik agraria dan interaksi dengan satwa liar, nilai-nilai ini dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam menilai praktik pengelolaan sumber daya agar tetap adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kemaslahatan bersama (Nurholis, 2025).

Studi Fenomenologi Sosial Ekonomi

Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman hidup masyarakat secara langsung dalam menghadapi konflik hak kepemilikan tanah dan ancaman satwa liar. Pendekatan ini menekankan pada makna subjektif yang dibentuk oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, fenomenologi digunakan untuk menggali bagaimana masyarakat memaknai konflik, dampak yang dirasakan, serta strategi adaptasi sosial ekonomi yang mereka lakukan dalam kehidupan nyata (Dan et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman hidup masyarakat dalam menghadapi konflik hak kepemilikan tanah dan ancaman satwa liar di desa penyangga hutan Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Fokus penelitian diarahkan pada pemaknaan subjektif masyarakat terhadap dinamika sosial ekonomi yang mereka alami (Srifitriani & Zulfikar, n.d.). Lokasi penelitian berada di Desa Penyangga hutan/ desaya yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan diantaranya yang terdapat konflik Desa Ringin Jaya, Sukamarga, dan Tugu Ratu, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan penyangga hutan yang memiliki intensitas konflik agraria dan interaksi manusia dengan satwa liar yang cukup tinggi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung di lapangan. Informan penelitian meliputi masyarakat lokal, tokoh adat, serta aparat desa yang mengetahui kondisi sosial ekonomi dan konflik di wilayah penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi terkait, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman subjektif masyarakat,

observasi untuk memahami kondisi faktual di lapangan, dan dokumentasi untuk memperkuat data penelitian dari sumber tertulis.

Tabel 2. Tabel Data Narasumber atau Informan

No.	Nama	Status
1.	Hendriyanto	Pratin desa ringan jaya
2.	Jaimin	Pratin desa sukamarga
3.	Herlin	Pratin desa Tugu Ratu
4.	Sutijo	Warga desa tugu ratu /Petani
5.	Hulwani	Masyarakat desa tugu ratu /Petani
6.	Jahit	Masyarakat desa sukamarga /Petani
7.	Fatimah	Masyarakat desa sukamarga /Petani
8.	Udin	Masyarakat desa ringan jaya /Petani
9.	Mediansyah	Tim satgas
10.	Khoirudin	Tim satgas

Sumber: Data Lapangan

Analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis dilakukan melalui tahapan transkripsi data hasil wawancara, pengelompokan kode menjadi tema-tema utama, serta penarikan kesimpulan (Mashadi, n.d.). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola pengalaman masyarakat terkait konflik hak kepemilikan tanah dan ancaman satwa liar, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

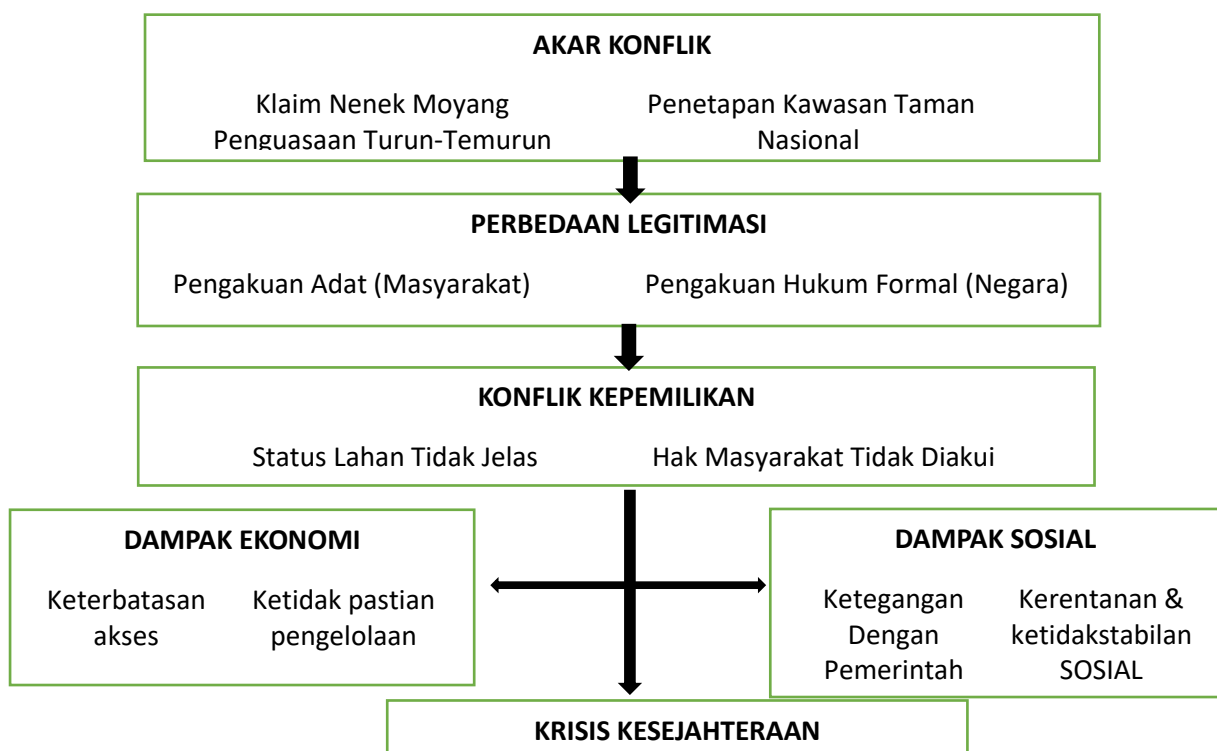
Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai ekonomi Islam terlihat relevan dalam menjelaskan kondisi yang dihadapi masyarakat desa penyangga hutan. Dalam praktiknya, masyarakat memandang lahan bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan konsep kepemilikan dalam Islam yang tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada nilai moral dan sosial. Nilai keadilan tercermin dari harapan masyarakat terhadap adanya kepastian hak atas lahan yang mereka kelola. Ketika kepastian tersebut tidak terpenuhi, muncul rasa ketidakadilan yang berdampak pada ketidakstabilan sosial (Muhammad Khaerul Umam, 2022). Selain itu, nilai kemaslahatan juga terlihat dari bagaimana masyarakat berusaha tetap memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Sementara itu, nilai amanah tercermin dalam upaya masyarakat menjaga lahan dan lingkungan agar tetap dapat digunakan secara berkelanjutan (Islam et al., 2025).

Konflik Hak Kepemilikan Tanah

Berdasarkan hasil temuan lapangan, konflik hak kepemilikan tanah di Kecamatan Suoh tidak hanya disebabkan oleh faktor administratif, tetapi juga berakar pada klaim historis masyarakat. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka telah menempati dan mengelola lahan tersebut secara turun-temurun sejak masa nenek moyang, bahkan sebelum adanya penetapan batas kawasan taman nasional oleh pemerintah. Klaim tersebut menunjukkan adanya dualisme sistem kepemilikan, yaitu antara pengakuan berbasis adat dan pengakuan berbasis hukum formal. Dari perspektif masyarakat, keberadaan mereka di wilayah tersebut dianggap sah karena didasarkan pada sejarah penguasaan lahan yang telah berlangsung lama. Namun, dari sisi hukum formal, lahan tersebut masuk dalam kawasan yang

diatur oleh negara, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara legitimasi sosial dan legalitas hukum (Anshori et al., 2025). Ketidaksesuaian ini kemudian menjadi pemicu utama konflik, karena masyarakat merasa memiliki hak atas lahan yang mereka kelola, sementara secara hukum mereka tidak memiliki bukti kepemilikan yang diakui negara. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem kelembagaan agraria, khususnya dalam mengakomodasi hak-hak masyarakat lokal yang telah lama bermukim di wilayah tersebut (Pancarani & Wahyuni, 2023). Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, konflik ini mencerminkan kegagalan institusi dalam menyelaraskan aturan formal dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, muncul ketidakpastian hak kepemilikan yang berdampak pada terbatasnya akses ekonomi dan meningkatnya kerentanan masyarakat



Gambar 1. Diagram Konflik Hak Kepemilikan Tanah

Ancaman Satwa Liar

Konflik antara manusia dan hewan buas di Indonesia, khususnya di daerah - daerah yang berbatasan langsung dengan hutan atau kawasan konservasi, semakin meningkat. Salah satu contoh kasus yang mencolok terjadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan kawasan dengan ekosistem hutan tropis. Konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok- kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (Jurnal & Sosial, 2025) Konflik antara manusia dan hewan buas, atau lebih umum disebut konflik manusia dengan satwa liar yaitu harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) Gajah Sumatera (*Elephant Maximus Sumatranus*), merupakan interaksi negatif yang terjadi ketika aktivitas manusia dan kebutuhan satwa liar saling bertabrakan (Pada et al., 2024). Salah satu ancaman utama berasal dari kawanan gajah yang kerap keluar dari kawasan hutan, terutama pada malam hari, dan memasuki lahan perkebunan masyarakat. Gangguan tersebut menyebabkan kerusakan tanaman dalam skala yang cukup besar. Informan menyampaikan bahwa lahan

perkebunan yang telah ditanami dan dirawat dalam jangka waktu tertentu dapat rusak dalam satu waktu akibat pergerakan kawanan gajah. Kondisi ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan serta meningkatkan risiko kegagalan panen.

Selain itu, masyarakat juga menghadapi ancaman dari satwa liar lain seperti harimau. Dalam beberapa kasus, keberadaan harimau di sekitar area perkebunan menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran bagi masyarakat saat beraktivitas. Informan menyebutkan bahwa terdapat kejadian serangan terhadap manusia di area kebun, sehingga membatasi waktu dan ruang gerak masyarakat dalam mengelola lahan mereka (Setyanto et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik antara manusia dan satwa liar tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek keamanan dan psikologis masyarakat. Ketidakpastian dalam beraktivitas serta ancaman terhadap keselamatan menjadi faktor yang memperburuk kerentanan masyarakat desa penyangga hutan (Makmur et al., 2024).

Fenomena ini mencerminkan meningkatnya intensitas konflik manusia dan satwa liar sebagai dampak dari perubahan ekosistem dan penyempitan habitat, yang pada akhirnya menempatkan masyarakat pada posisi rentan baik secara ekonomi maupun sosial (Nisa et al., n.d.).

Tabel 3 Daftar Satwa liar Yang Mengganggu dan Merusak Tanaman Masyarakat

NO.	Jenis Satwa	Pola Gangguan	Dampak Terhadap Tanaman	Waktu Kemunculan	Tingkat Ancaman
1.	Gajah	Datang berkelompok Menginjak & merusak serta menimbulkan gangguan aktifitas	Tanaman rusak dalam skala luas	Malam hari	Tinggi
2.	Harimau	Muncul di sekitar kebun, menimbulkan gangguan aktivitas	Tidak merusak tanaman secara langsung, namun menghambat pengelolaan lahan	Sore – Malam	Tinggi

Sumber; Hasil Observasi dan Wawancara di Kecamatan Suoh.

Berdasarkan Tabel 3, ancaman satwa liar di Kecamatan Suoh didominasi oleh gajah dan harimau yang memiliki pola gangguan berbeda. Gajah memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian melalui aktivitas merusak lahan dan tanaman secara fisik. Pergerakannya yang berkelompok menyebabkan kerusakan dalam skala luas dalam waktu singkat, terutama pada malam hari, sehingga berkontribusi besar terhadap terjadinya kegagalan panen. Sementara itu, harimau tidak menimbulkan kerusakan tanaman secara langsung, namun keberadaannya di sekitar area perkebunan menciptakan ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya aktivitas pengelolaan lahan, karena masyarakat cenderung mengurangi intensitas bekerja, khususnya pada waktu-waktu tertentu.

Perbedaan pola gangguan ini menunjukkan bahwa ancaman satwa liar tidak hanya bersifat fisik terhadap tanaman, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, keberadaan gajah dan harimau berkontribusi terhadap penurunan produktivitas pertanian serta meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat desa penyangga hutan. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Pratiwi et al., 2022). Penurunan hasil panen menyebabkan pendapatan rumah tangga menjadi tidak stabil, sementara keterbatasan dalam mengelola lahan mempersempit

sumber penghidupan. Selain itu, masyarakat juga harus mengeluarkan tenaga dan biaya tambahan untuk menjaga lahan dari gangguan satwa liar.

Lebih lanjut, ketidakpastian dalam aktivitas pertanian menimbulkan tekanan sosial dan psikologis, seperti rasa cemas dan ketakutan saat beraktivitas di kebun. Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan upaya adaptasi melalui kerja sama dan solidaritas dalam menjaga lahan serta saling membantu dalam menghadapi risiko kerugian. Dengan demikian, konflik antara manusia dan satwa liar tidak hanya berdampak pada aspek produksi pertanian, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat.

Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak dari konflik kepemilikan tanah dan ancaman satwa liar dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat hasil panen yang tidak menentu. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan tanaman akibat gangguan gajah sering kali menyebabkan penurunan hasil panen, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kegagalan panen (Pada et al., 2024). Di sisi lain, keberadaan harimau di sekitar area perkebunan membatasi waktu dan ruang gerak masyarakat dalam mengelola lahan. Kondisi ini menyebabkan sebagian lahan tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga mengurangi potensi produksi pertanian. Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa konflik manusia dan satwa liar berdampak langsung terhadap penurunan produktivitas pertanian dan pendapatan rumah tangga.

Dampak tersebut berpengaruh langsung terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Penghasilan yang sebelumnya bergantung pada hasil pertanian menjadi tidak stabil, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga lahan, seperti membuat penghalang sederhana atau melakukan penjagaan secara bergiliran (Petani, 2018). Studi lain juga menegaskan bahwa tekanan terhadap sumber penghidupan dapat meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga di wilayah pedesaan (Rifaie et al., 2021).

Lebih lanjut, kondisi ini juga memunculkan dampak sosial dan psikologis, seperti rasa cemas dan ketidakpastian terhadap keberlanjutan penghidupan. Masyarakat merasa khawatir terhadap kemungkinan kerugian yang dapat terjadi sewaktu-waktu akibat gangguan satwa liar maupun konflik lahan. Namun demikian, masyarakat di Kecamatan Suoh menunjukkan kemampuan adaptasi melalui penguatan solidaritas sosial. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat melakukan kerja sama dalam menjaga lahan serta saling membantu dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kesejahteraan di tengah berbagai keterbatasan (Setyanto et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik kepemilikan lahan dan ancaman satwa liar tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kesimpulan

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik hak kepemilikan tanah dan ancaman satwa liar di Kecamatan Suoh merupakan dua faktor yang saling berinteraksi dalam memengaruhi kesejahteraan masyarakat desa penyangga hutan. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan akibat perbedaan antara klaim historis masyarakat dan legalitas formal negara menyebabkan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut diperparah oleh gangguan satwa liar, khususnya gajah dan harimau, yang menimbulkan kerusakan langsung pada lahan pertanian serta pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat. Interaksi kedua faktor

ini berimplikasi pada penurunan produktivitas, ketidakstabilan pendapatan, serta meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat.

Temuan penelitian menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas kelembagaan dan kondisi lingkungan. Ketidakpastian hak atas lahan serta risiko konflik dengan satwa liar menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan memperlemah ketahanan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah dan pengelola kawasan hutan meningkatkan pengawasan terhadap satwa liar yang dilindungi serta memperkuat sistem mitigasi konflik secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi pengakuan hak masyarakat secara lebih adil melalui pendekatan kelembagaan yang adaptif. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan keseimbangan antara upaya konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai model penyelesaian konflik berbasis kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola kawasan hutan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis kelembagaan yang lebih mendalam terkait pengakuan hak masyarakat serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kajian mengenai strategi mitigasi konflik manusia dan satwa liar berbasis kearifan lokal juga penting dilakukan guna menghasilkan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif di lapangan.

Daftar Pustaka

- Anshori, M. W., Syahrier, F. A., & Ahmad, Z. H. (2025). *Penyelesaian Konflik Agraria Dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Bukit Kapur*. 6, 247–261. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i2.273>
- Budianto, K., & Apriani, R. (2026). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Konflik Sengketa Tanah Ditinjau Dari Politik Agraria (Studi pada Desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuwasin)*. 9(1), 606–616. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2662.Land>
- Dan, P., Analisis, T., & Fadila, R. (2024). *Grounded Theory Dan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif*: 20–32.
- Hafizuddin, A., Yusof, M., Hafiz, A., Rahman, A., & Abas, A. (2026). *COMPENDIUM by paperASIA A Systematic Literature Review on the Human-Wildlife Conflict in Agricultural Area COMPENDIUM by paperASIA*. 42.
- Islam, K., Mengelola, D., & Hutan, A. (2025). *Islamic Studies Journal for Social Transformation*. 09(02), 125–142.
- Jurnal, S., & Sosial, I. (2025). *Partisipasi Masyarakat Menangani Konflik Manusia dan Hewan Buas (Studi Respon dan Peran terhadap Kebijakan Pemerintah pada Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)*. 4(4), 1170–1178. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i4.6353>
- Makmur, A., Riandi, L. V., Siregar, A. W., & Armanda, F. (2024). Evaluasi Konflik Masyarakat Dengan Satwa Liar Di Desa Tongra Kecamatan Teragun Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Dan Pertanian Versi*, 18(1).
- Mashadi, A. I. (n.d.). *Teologi Islam Kontemporer dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan*.
- Muhammad Khaerul Umam. (2022). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah: Theory and Application*, 3(1), 56.

- Nisa, M., Fathoni, I., Geografi, J., Sosial, F. I., & Malang, U. N. (n.d.). *Dampak Alih Fungsi Lahan Dalam Studi Kasus Konflik Manusia dan Harimau Sumatera di Sumatera*. 5.
- Nurholis, M. (2025). *Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia ' s Perspective*. 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Pada, M., Jelajah, D., Seblat, G., Purba, R. A., Suharto, E., & Senoaji, G. (2024). *No Title*. 4(2), 1–18.
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2), 110–124. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>
- Petani, K. E. (2018). *Indonesian Journal of Anthropology Petani, Lahan dan Pembangunan: Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani*. 3(2), 95–104.
- Pratiwi, P., Iswandaru, D., Hilmanto, R., Febryano, I. G., Ismanto, I., Sugiharti, T., & Subki, S. (2022). Analisis Konflik Manusia Dengan Gajah Di Sekitar Resort Pemerihan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Berdasarkan Persepsi Masyarakat Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Belantara*, 5(1), 106–118. <https://doi.org/10.29303/jbl.v5i1.813>
- Rifaie, F., Sulistyadi, E., & Fitriana, Y. S. (2021). *A review of patterns and geographical distribution of human-wildlife conflicts in Indonesia*. 27(1), 41–50.
- Setyanto, A. R., Ekonomi, P., & Islam, M. (2024). *Dinamika Modal Sosial Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Petani Sawit Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Masyarakat Islam*. 4(1), 230–237.
- Srifitriani, A., & Zulfikar, A. A. (n.d.). *No Title*.
- Tjachja, A., Zahara, S., Suhartini, I., & Zahid, U. (2024). *The Role of Social Capital on Community Resilience in Rural Areas: A Case Study in Ponggok Village , Indonesia*. 2(1). <https://doi.org/10.21776/rrs.v2i1.27>
- Woolaston, K., Flower, E., Velden, J. Van, White, S., & Leah, G. (2023). *A Review of the Role of Law and Policy in Human-Wildlife Conflict*. 19(3), 172–183. <https://doi.org/10.4103/cs.cs>
- Zuber, A. (n.d.). *KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA*. 8(1), 147–158.